



# **RENCANA SETRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026**



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
JI. TULIP NOMOR 3 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT  
TELP. (0728) 21159 FAX (0728) 21567  
K

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang jelas sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah telah menyusun Renstra dalam rangka melaksanakan berbagai program pengawasan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2023-2026 yang sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra bukan hanya menjadi ritual lima tahunan yang menjadi kewajiban OPD, namun penyusunan Renstra ini merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dan peluang yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Lampung Barat. Menindaklanjuti program dan kegiatan yang harus dilaksanakan Inspektorat, maka perlu dilakukan penyusunan Renstra dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat yang didelegasikan ke Inspektorat. Renstra digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang cermat dan pengawasan yang ketat akan mempermudah pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan kinerja pengawasan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, Februari 2022



## D A F T A R I S I

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>28</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	29
3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah dan Renstra Inspektorat Provinsi .....	30
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	31
3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis .....	31
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>33</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	33
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>25</b>
5.1. Strategi .....	35
5.2. Kebijakan .....	35
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VI. PENUTUP.....</b>	<b>45</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah.. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Tujuan, Strategi, Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam mengimplementasikan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* dalam mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah melalui proses yang transparan dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keluarnya Permendagri tersebut akan memperkuat tugas, fungsi dan peran Kepala Perangkat Daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan

daerah serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan Perangkat Daerah.

Sejalan dengan berubahnya paradigma pembangunan Pemerintah Republik Indonesia dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Otonomi Daerah, kewenangan telah diberikan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada setiap daerah. Selain itu juga telah diamanatkan agar dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan daerah harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, dengan kata lain bahwa masyarakat harus diberdayakan melalui aktifnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan di daerah.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat harus segera direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkewajiban untuk mengawal dan mengawasi terlaksananya pembangunan di Lampung Barat agar pembangunan yang direncanakan dari awal hingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dan memberikan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten mempunyai beban berat untuk memastikan bahwa seluruh instrumen pembangunan dapat secara sinergis mewujudkan pembangunan di Lampung Barat sesuai dengan yang dicita-citakan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka mengakomodasikan kondisi tersebut maka Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan mengoptimalkan pemanfaatan semua potensi sumberdaya yang ada secara berkelanjutan serta memanfaatkan semua peluang yang dimilikinya untuk mengawal pembangunan, berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat No. 70 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat Daerah” telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat

Kabupaten Lampung Barat 2023–2026 dengan tujuan agar Inspektorat Kabupaten Lampung Barat bersama seluruh Institusi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengawasi dan mengawal terlaksananya semua program dan kegiatan pembangunan daerah sehingga menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, serta mudah dipantau dan terukur pencapaian hasilnya.

Sebagai konsekuensi logisnya maka Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dituntut untuk merumuskan dan menyusun rencana strategisnya selaras dengan Rencana Strategis Kabupaten Lampung Barat 2023–2026. Hal ini mengingat peran Inspektorat baik sebagai sub sistem pengawasan yang tak dapat dipisahkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lampung Barat maupun sebagai elemen pengawasan fungsional internal dalam sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis memuat semua program dan kegiatan pembangunan dengan harapan dapat menjadi padu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, serta mudah dipantau dan terukur pencapaian hasilnya dengan mengandung tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan serta Indikator Kinerja yang merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah daerah, khususnya Inspektorat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis strategis untuk menjabarkan potret instansi serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD. Oleh karenanya, maka sebagai Landasan hukum penyusunan Renstra adalah :

- 1) Landasan Idiil Pancasila;
- 2) Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945;

- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat;
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- 13) Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- 17) Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/435/A-2/IJ tanggal 7 April 2017 tentang Standar Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 19) Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- 20) Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) disusun dengan maksud untuk menetapkan pedoman pelaksanaan arah pengawasan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki serta partisipasi masyarakat yang juga ikut melakukan pengawasan terhadap seluruh kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

### **1.3.2. Tujuan**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terpadu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk tahun 2023-2026, yang menjadi acuan bagi Inspektorat dalam menetapkan perencanaan program dan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Tersusunnya tujuan, sasaran dan indikator pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan.
- c. Tersusunnya berbagai kebijakan dan kegiatan strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang akan menjadi acuan bagi penyusunan kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
- d. Sebagai acuan bagi Inspektorat dalam menyusun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan urusan pemerintahan dan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Inspektorat Kabupaten Lampung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra OPD dan Renstra Inspektorat Provinsi
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai pengawas internal mempunyai kewenangan lain yaitu melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Lampung Barat, serta berfungsi sebagai lembaga yang memberikan masukan kepada Kepala Daerah. Karena posisinya sebagai pembantu pimpinan puncak (*top management*) Inspektorat telah memiliki wilayah yang jelas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, hal ini bertujuan agar kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur.

#### **2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah mempunyai struktur organsasi yang terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Administrasi Umum
  2. Sub Bagian Perencanaan
  3. Sub Bagian Evaluasi Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu I
- d. Inspektur Pembantu II

- e. Inspektur Pembantu III
- f. Inspektur Pembantu IV
- g. Inspektur Pembantu V
- h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Meskipun telah terbentuk Kelompok Jabatan Fungsional yakni Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD, namun secara kuantitas belum mencukupi komposisi yang seharusnya dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten berjumlah 40 orang sehingga Pejabat Struktural masih ikut melaksanakan tugas pengawasan begitu juga sebaliknya.

Dengan kondisi seperti ini perlu adanya penataan kembali kelembagaan dilingkungan Inspektorat khususnya formasi untuk pejabat fungsional agar setiap jabatan baik jabatan struktural, fungsional maupun jabatan fungsional umum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat Daerah

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**a. Inspektur**

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Inspektor menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

**b. Sekretaris**

Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja dilingkup sekretariat Inspektorat;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan tugas administrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Sekretariat dan lingkup Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat membawahi 3 Subbag, dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

a. Sub Bagian Administrasi dan Umum

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan dan penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup Sub Bagian Administrasi Umum
- 2) Pengelolaan administrasi dan umum
- 3) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat.

b. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data dibidang pengawasan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana dan program kerja dilingkup Inspektorat;
- 2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan;
- 3) pengelolaan administrasi perencanaan, pengembangan, analisa dan evaluasi; dan
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan dan lingkup Inspektorat.

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Penyusunan, menghimpun, mengolah laporan hasil pengawasan;
- 3) Melaksanakan administrasi pengaduan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan.

**c. Inspektur Pembantu**

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta kasus pengaduan di daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur di wilayahnya masing-masing.

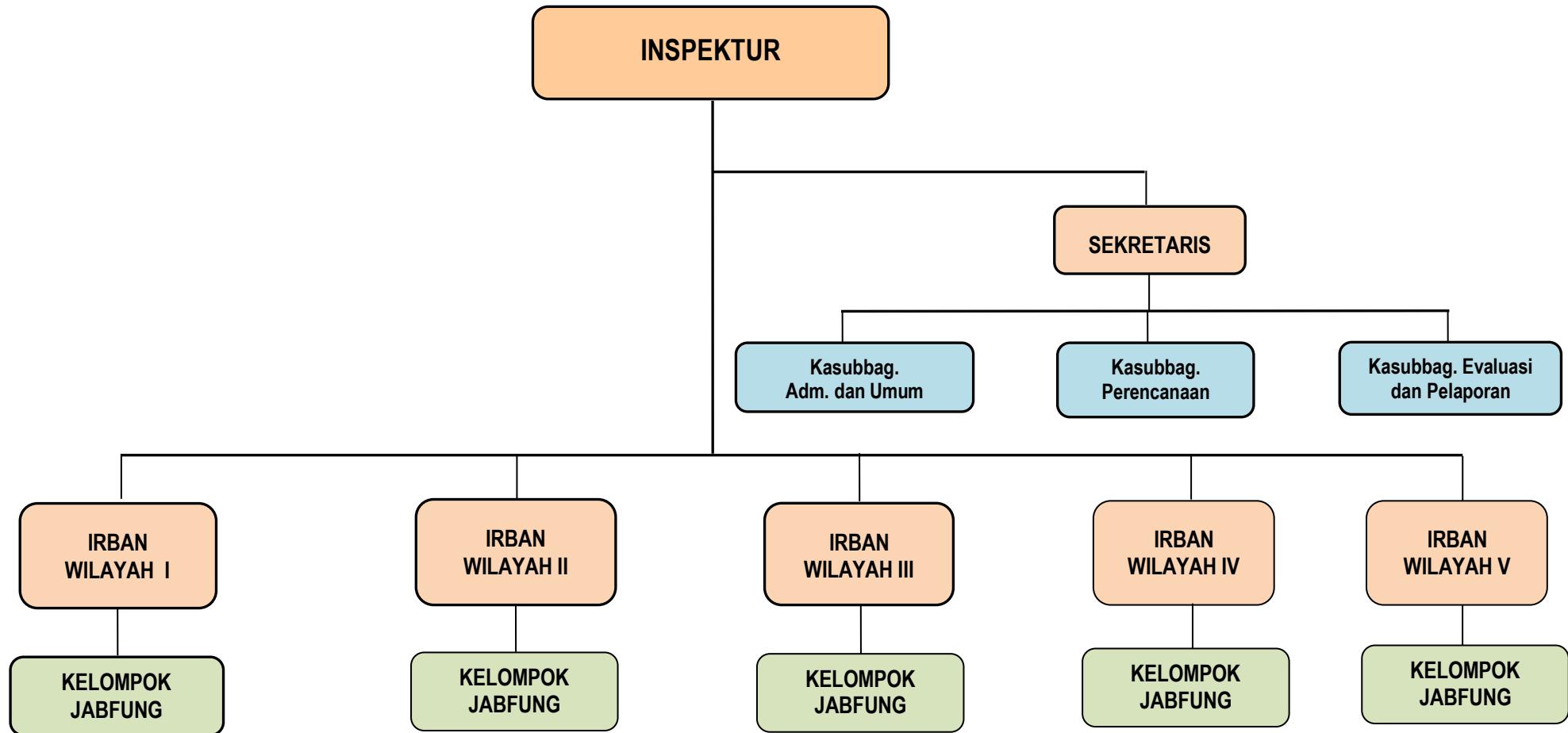
Untuk menyelenggarakan tugasnya Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana dan program kerja di bidang inspektur pembantu;
- 2) perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang inspektur pembantu;
- 3) pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program pengawasan di bidang inspektur pembantu; dan
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Inspektur Pembantu.

**d. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :



## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat saat ini berdasarkan status, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, kedudukan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan baik struktural, fungsional dan teknis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Menurut Status :

Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat secara keseluruhan sebanyak 56 orang yang terdiri dari 50 orang (84,61 %) PNS dan 6 orang (15,38 %) Pegawai Honorer. Dari jumlah tersebut, Inspektorat Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan pegawai, asumsi kekurangan pegawai ini disebabkan belum terpenuhinya komposisi jumlah pejabat fungsional pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang seharusnya sebanyak 48 orang sehingga pejabat struktural dan fungsional umum/staf juga melaksanakan tugas pemeriksaan.

b. Menurut Pangkat/Golongan:

Berdasarkan Kepangkatan/golongan, dari 50 orang PNS tersebut dapat dirinci sebagai berikut : Golongan IV sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang (36,36%); Golongan III sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang (51,51%), dan Golongan II sebanyak 2 (dua) orang (12,12%). Lebih lanjut rincian pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Data Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2	Pembina Tingkat I	IV/b	8 orang
3	Pembina	IV/a	15 orang
4	Penata Tingkat I	III/d	7 orang
5	Penata	III/c	7 orang
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	6 orang
7	Penata Muda	III/a	4 orang
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1 orang
9	Pengatur Muda	II/c	1 orang

c. Menurut Tingkat Pendidikan :

Berdasarkan tingkat Pendidikan, dari 50 orang PNS Inspektorat dapat dirinci sebagai berikut : Pasca Sarjana (S2) sebanyak 10 orang (9,09%); Sarjana (S1) sebanyak 38 orang (72,72%); SLTA sebanyak 2 orang (15,15%).

**Tabel 2.2**  
**Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	10 orang
2.	Sarjana (S1)	38 orang
3.	Sarjana Muda	0 orang
4.	SMA/SMK/Sederajat	2 orang

d. Menurut Kedudukan Dalam Jabatan :

Berdasarkan kedudukan dalam jabatan, dari 50 orang PNS Inspektorat yang menduduki jabatan struktural sebanyak 10 orang (27,27%), yang menduduki jabatan fungsional Auditor sebanyak 10 orang (24,24), yang menduduki jabatan fungsional P2UPD 18 orang (27,27%) dan fungsional umum/ staf sebanyak 12 orang (21,21%). Rincian kedudukan pegawai dalam jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Data Pegawai Berdasarkan Kedudukan Dalam Jabatan**

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	10 orang
2.	Jabatan Fungsional Auditor	10 orang
3.	Jabatan Fungsional P2UPD	18 orang
4.	Jabatan Fungsional Umum / Staf	12 orang

e. Sumber Daya Sarana dan Prasarana / Asset

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat cenderung terbatas, namun pelaksanaan tugas dan fungsi tetap dilaksanakan secara maksimal guna mencapai target program dan kegiatan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Daftar Asset Inspektorat Kabupaten Lampung Barat**

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah (unit)	Ket / Kondisi/ Luas
1.	Gedung	1	282m <sup>2</sup>
2.	Kendaraan Roda 4 (Mini Bus)	2	RR
3.	Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	1	RR
4.	Kendaraan Roda 2	4	RR
5.	Genset	2	1 RB, 1 B
6.	Filling Cabinet	20	Baik
7.	Lemari Besi	8	Baik
8.	Meja Kerja 1 Biro	6	Baik
9.	Meja Kerja ½ Biro	29	Baik
10.	Meja Kerja	10	Baik
11.	Kursi 1 Biro	7	Baik
12.	Kursi Tamu	4	Baik
13.	Kursi Lipat	59	Baik
14.	Kursi Putar	3	Baik
15.	Meja Komputer	2	RR
16.	Komputer	4	Baik
17.	Printer	6	RR
18.	Laptop	1	RB
19.	Mesin Ketik	2	1 Unit RB
20.	Brankas	2	RR
21.	Faximile	1	RR
22.	UPS	-	-
23.	Televisi	1	unit
24.	Telepon	2	RR
25.	Wireless	1	RR
26.	Lemari Buku Kaca	1	Baik
27.	Infokus	1	Baik
28.	Kamera	1	Baik
29.	Projection Screen	1	Baik
30.	Lemari Arsip	2	Baik

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Kabupaten merupakan Organisasi Perangkat Daerah penunjang yang berfungsi mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu Tugas Pokok Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui :

- a. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif) dengan mengedepankan pembinaan daripada tindakan ;
- b. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah .

Mengenai penanganan atas pengaduan masyarakat baik melalui pemberitaan media massa, surat maupun pengaduan langsung dari masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanismenya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kedepan Inspektorat tetap akan melakukan perbaikan kualitas pelayanan antara lain :

- a. Memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemberikan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah.
- b. Melaksanakan pembinaan dan memberikan konsultansi kepada Perangkat Daerah dan stake holder yang membutuhkan.

- c. Memberikan pertimbangan atau masukan kepada pimpinan dalam pemberian *reward* kepada ASN/PNS yang berprestasi atau memberikan kontribusi aktif dan signifikan dan *punishment* kepada oknum ASN/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

## **2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.3.1. Tantangan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat menghadapi beberapa tantangan sehingga hasil yang diperoleh belum dapat maksimal. Adapun tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Semakin berat dan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan Inspektorat sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/435/A-2/IJ tanggal 7 April 2017 tentang Standar Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 menuntut Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk terus mengembangkan kualitas dan kuantitasnya.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja. Gedung Kantor yang sudah tidak representatif untuk mendukung suasana kerja dan sarana komputer (PC) dan printer yang sangat minim, yakni hanya tersedia 4 (tiga) unit komputer dan 6 (enam) unit printer serta 1 (satu) unit mobil operasional yang sudah tidak dapat digunakan untuk sebagai kendaraan operasional. Kondisi ini tentu saja menghambat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga sebagian besar pegawai menggunakan laptop dan printer milik pribadi
- c. Mempertahankan Penetapan target nasional ke Level 3 bagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) se-Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Presiden dalam Nawa Cita Pembangunan.

- d. Rekomendasi hasil temuan pemeriksaan belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan bagi pengambil kebijakan / keputusan. Hal ini menyebabkan penanganan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan khususnya temuan yang bersifat keuangan kurang mendapatkan respon dari Perangkat Daerah.
- e. Kualitas sumber daya yang ada belum optimal. Tingkat pemahaman dan pengetahuan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan berbeda-beda sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan tentunya menjadi kendala pada saat menentukan rekomendasi. Kesempatan mengikuti diklat bagi pegawai masih terbatas dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas.

### **2.3.2. Peluang**

Selain tantangan yang dihadapi, Inspektorat juga mempunyai beberapa peluang yang mendukung tercapainya seluruh target program dan kegiatan. Adapun peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan pimpinan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja dalam hal pengalokasian anggaran. Dalam 2 (dua) tahun terakhir pimpinan mengusulkan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung pelaksanaan kegiatan.
- b. Adanya peraturan/ketentuan hukum serta sistem dan norma tentang pengawasan. Hal ini menjadi acuan dan pedoman bagi tim pemeriksa yang belum fungsional dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Partisipasi masyarakat ini ditampung pada kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat. Dalam hal ini masyarakat dapat membuat pengaduan apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan dan atau penggunaan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

- d. Banyaknya tawaran untuk mengikuti Diklat/bimtek/workshop baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, Pusdiklat Pengawasan BPKP maupun yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Perguruan Tinggi dan Lembaga Swasta.
- e. Sinergitas antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawas Eksternal (BPK-RI). Telah dibentuk Forum Komunikasi APIP yang terdiri dari seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta terjalannya hubungan kerja yang baik dengan Pengawas Eksternal (BPK-RI).

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Hingga saat ini permasalahan yang masih menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dalam upaya mengefektifkan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan antara lain :

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas / kompetensi. Menurut analisis jabatan bahwa pada Inspektorat Kabupaten minimal sebanyak 62 orang yang terdiri dari 10 orang pejabat struktural, 27 orang pejabat fungsional Auditor, 13 orang pejabat fungsional P2UPD dan 12 staf.
2. Persepsi sebagian unsur pemerintahan (Instansi / satuan kerja dan legislatif) serta masyarakat tentang peran Inspektorat hanya melakukan langkah represif berupa pemeriksaan/ audit). Hal ini menghambat Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang seyogyanya juga melakukan langkah persuasif yaitu melakukan langkah-langkah evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja satuan kerja sehingga indikasi terjadinya penyimpangan dapat dihindari sejak dini
3. Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan kurang mendapat respon yang baik dari Perangkat Daerah sehingga pada Rapat Koordinasi di tingkat provinsi, regional maupun nasional temuan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih banyak yang belum ditindak lanjuti.

### **3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah dan Renstra Inspektorat Provinsi**

Inspektorat sebagai salah satu bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah melaksanakan program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Inspektorat Provinsi yakni "*Terwujudnya fungsi pengawasan daerah yang efektif akuntabel, profesional serta bersinergi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota serta APP lainnya*". Inspektorat Kabupaten berupaya untuk meningkatkan sinergi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah agar dalam pencapaian tujuan dan sasaran lebih efektif, efisien dan akuntabel. Pengawasan tersebut harus dapat bersinergi dengan Inspektorat Provinsi dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya seperti BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung serta lainnya. Bersinergi dalam arti terdapat kesinambungan, baik program, jadwal maupun aparat yang melakukan pemeriksaan dengan pola pengaturan yang baik.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam hal ini program dan kegiatan Inspektorat tidak memiliki keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **3.5. Penentuan isu - Isu Strategis**

Keberhasilan manajemen dan eksistensi sebuah organisasi dapat dilihat dari seberapa jauh kemampuan organisasi tersebut untuk beradaptasi terhadap lingkungannya yang bersifat dinamis. *Environment scan* meliputi kondisi eksternal dan internal. Kondisi Internal terdiri dari Kelemahan (*weakness*) dan Kekuatan (*strengths*) sedangkan kondisi eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Inspektorat Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai satuan kerja yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dibuat dapat direalisasikan serta dapat berdaya guna bagi kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

Untuk lebih meningkatkan kinerjanya Inspektorat Kabupaten Lampung Barat perlu difasilitasi melalui dana untuk melaksanakan pengawasan, dengan semakin banyaknya kegiatan yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dana yang dialokasikan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat juga dapat ditingkatkan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya dan juga dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2900/SJ tanggal 23 September 2008 pada point (3) yang berbunyi ”.....ditegaskan kembali kepada Gubernur untuk dapat memberikan prioritas peningkatan alokasi anggaran minimal 1 % pada APBD Tahun 2009 kepada Bawasda/Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota, guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....”.

Namun sampai dengan saat ini alokasi anggaran minimal 1% tersebut belum dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah, meskipun demikian Inspektorat Kabupaten Lampung Barat tetap berusaha untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara maksimal.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat, antara lain :

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas / kompetensi. Menurut analisis jabatan bahwa pada

Inspektorat Kabupaten minimal sebanyak 62 orang yang terdiri dari 10 orang pejabat struktural, 27 orang pejabat fungsional Auditor, 15 orang pejabat fungsional P2UPD dan 10 orang staf.

2. Persepsi sebagian unsur pemerintahan (Instansi / satuan kerja dan legislatif) serta masyarakat tentang peran Inspektorat hanya melakukan langkah represif berupa pemeriksaan/ audit). Hal ini menghambat Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang seyogyanya juga melakukan langkah persuasif yaitu melakukan langkah-langkah evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja satuan kerja sehingga indikasi terjadinya penyimpangan dapat dihindari sejak dini
3. Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan kurang mendapat respon yang baik dari Perangkat Daerah sehingga pada Rapat Koordinasi di tingkat provinsi, regional maupun nasional temuan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih banyak yang belum ditindak lanjuti.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah yang telah ditepatkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- Tujuan : Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan berwibawa  
Indikator : Nilai Reformasi Birokrasi  
Tujuan  
Sasaran : Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan yang efektif  
Indikator : 1. Level Kapabilitas APIP  
Sasaran  
                  2. Maturitas SPIP

Untuk lebih jelas Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan yang efektif	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3 dengan catatan	Level 3 dengan catatan	
			Maturitas SPIP	Level 2 dengan Catatan	Level 2 dengan Catatan	Level 3	Level 3	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Untuk mencapai Tujuan yang diharapkan maka Inspektorat harus menentukan beberapa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dengan menggunakan analisa Lingkungan Strategis.

Keberhasilan manajemen dan eksistensi sebuah organisasi sebenarnya dapat dilihat dari seberapa jauh kemampuan organisasi tersebut beradaptasi terhadap lingkungan strategis yang sangat dinamis.

Adapun strategi yang telah ditentukan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan secara berkala dan terprogram terhadap seluruh Perangkat Daerah
2. Meningkatkan koordinasi dengan APIP dan Pihak Eksternal lainnya sehingga sinergi pengawasan menjadi lebih efektif
3. Meningkatkan kompetensi APIP melalui berbagai pendidikan dan pelatihan
4. Mempertahankan level kapabilitas APIP Level 3 dan meningkatkan menuju Level 4
5. Meningkatkan Level Maturitas SPIP menuju Level 3

#### **5.1.2. Kebijakan**

Kebijakan merupakan pertimbangan yang diambil oleh Inspektorat dalam menentukan langkah yang efektif berdasarkan kondisi dan pertimbangan terhadap faktor internal dan eksternal yang sudah dirumuskan kedalam kegiatan dan program yang akan dilakukan oleh Inspektorat pada lima tahun ke depan (tahun 2023-2026) meskipun pada kenyataannya kebijakan ini juga dapat berubah sesuai dengan

kondisi yang terjadi antara tahun 2023-2026 berikut beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan pihak eksternal.
2. Mengoptimalkan pengelolaan pemerintahan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikutsertakan APIP pada diklat teknis fungsional
4. Mengikutsertakan APIP pada diklat teknis substantif
5. Meningkatkan level Maturitas SPIP

**Tabel 5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan yang efektif	Menghadiri Rakor tingkat Provinsi, Regional dan Nasional serta rakor yang diadakan pihak eksternal	Melaksanakan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah dan melaksanakan rakor dengan pihak eksternal
		Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengoptimalkan pengelolaan pemerintahan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi APIP untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikutsertakan APIP pada diklat teknis fungsional</li> <li>- Mengikutsertakan APIP pada diklat teknis substantif</li> <li>- Mempertahankan level kapabilitas APIP</li> </ul>
	Peningkatan Maturitas SPIP		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keandalan Pelaporan Keuangan</li> <li>- Pengamanan Aset Negara</li> <li>- Ketaata terhadap peraturan perundang-undangan.</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat untuk 5 (Lima) Tahun kedepan adalah merupakan rangkaian Program dan Kegiatan yang berkesinambungan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Sebagai gambaran umum Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, telah direncanakan sejumlah 3 (tiga) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan :
  1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
  1. Pendampingan dan Asistensi

Untuk lebih jelasnya Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Lampung Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Menin gkatny a Penyel enggar aan Pemer intahan Yang Bersih dan Berwib awa	Menin gkatny a Kualita s Pemer intahan Desa	6 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Bidang Urusan Yang Dilaksanakan	1 Bida ng Urus an	7.142.999.500	1 Bida ng Urus an	7.857.299.450	1 Bidang Urusan	8.643.029.395	1 Bidang Urusan	9.507.332.335	1 Bi da ng Ur us an	Inspektorat Dae rah	
		6 0 0 1 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	13 Dokumen	54.265.000	13 Dokumen	59.691.500	13 Dokumen	65.660.650	13 Dokumen	72.226.715	5 Do ku men	251.843.865	Inspektorat Daerah

		6	0 1	0 1	2 .	0 1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.540.000	2 Dokumen	15.994.000	2 Dokumen	17.593.400	2 Dokumen	19.352.740	8 Dokumen	67.480.140	Inspektorat Daerah
		6	0 1	0 1	2 .	0 1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.385.000	1 Dokumen	4.823.500	1 Dokumen	5.305.850	1 Dokumen	5.836.435	4 Dokumen	20.350.785	Inspektorat Daerah
		6	0 1	0 1	2 .	0 1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.120.000	1 Dokumen	4.532.000	1 Dokumen	4.985.200	1 Dokumen	5.483.720	4 Dokumen	19.120.920	Inspektorat Daerah
		6	0 1	0 1	2 .	0 1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.530.000	1 Dokumen	4.983.000	1 Dokumen	5.481.300	1 Dokumen	6.029.430	4 Dokumen	21.023.730	Inspektorat Daerah
		6	0 1	0 1	2 .	0 1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.720.000	1 Dokumen	4.092.000	1 Dokumen	4.501.200	1 Dokumen	4.951.320	4 Dokumen	17.264.520	Inspektorat Daerah
		6	0 1	0 1	2 .	0 1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	4.870.000	2 Dokumen	5.357.000	2 Dokumen	5.892.700	2 Dokumen	6.481.970	8 Dokumen	22.601.670	Inspektorat Daerah

						SKPD												
	6	0	0	2	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi perangkat daerah	5 Dokumen	18.100.000	5 Dokumen	19.910.000	5 Dokumen	21.901.000	5 Dokumen	24.091.100	2 Dokumen	84.002.100	Inspektorat Daerah
	6	0	0	2	0	Administiasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administiasi Keuangan yang disusun	19 Dokumen	5.936.124.500	19 Dokumen	6.529.736.950	19 Dokumen	7.182.710.645	19 Dokumen	7.900.981.710	7 Dokumen	27.549.553.805	Inspektorat Daerah
	6	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan	14 Dokumen	5.926.054.500	14 Dokumen	6.518.659.950	14 Dokumen	7.170.525.945	14 Dokumen	7.887.578.540	5 Dokumen	27.502.818.935	Inspektorat Daerah
	6	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	3.445.000	1 Dokumen	3.789.500	1 Dokumen	4.168.450	1 Dokumen	4.585.295	Dokumen	15.988.245	Inspektorat Daerah
	6	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	2 Dokumen	3.200.000	2 Dokumen	3.520.000	2 Dokumen	3.872.000	2 Dokumen	4.259.200	8 Dokumen	14.851.200	Inspektorat Daerah

						SKPD																
	6	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	3.425.000	2	Dokumen	3.767.500	2	Dokumen	4.144.250	2	Dokumen	4.558.675	8 Dokumen	15.895.425	Inspektorat Daerah
	6	0	0	2	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	30	Orang	329.350.000	30	Orang	362.285.000	30	Orang	398.513.500	30	Orang	438.364.850	1 Orang	1.528.513.350	Inspektorat Daerah
	6	0	0	2	0	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan penilaian kinerja pegawai	2	Kali	29.350.000	2	Kali	32.285.000	2	Kali	35.513.500	2	Kali	39.064.850	8 Kali	136.213.350	Inspektorat Daerah
	6	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat	18	Orang	300.000.000	19	Orang	330.000.000	20	Orang	363.000.000	21	Orang	399.300.000	7 Orang	1.392.300.000	Inspektorat Daerah
	6	0	0	2	0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan	3	Sub Organisasi	220.448.000	3	Sub Organisasi	242.492.800	3	Sub Organisasi	266.742.080	3	Sub Organisasi	293.416.288	1 Sub Organisasi	1.023.099.168	Inspektorat Daerah

							pengadmnistrasi umumnya												
	6	0	0	2	0	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	10 Jenis	2.750.000	10 Jenis	3.025.000	10 Jenis	3.327.500	10 Jenis	3.660.250	4 Je0 nis	12.762.750	Inspektorat Daerah
	6	0	0	2	0	5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	14 Jenis	25.100.000	14 Jenis	27.610.000	14 Jenis	30.371.000	14 Jenis	33.408.100	5 Je6 nis	116.489.100	
	6	0	0	2	0	6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	4 SKH U	4.360.000	4 SKH U	4.796.000	4 SKHU	5.275.600	4 SKHU	5.803.160	1 SK6 HU	20.234.760	Inspektorat Daerah
	6	0	0	2	0	8	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	12 Bulan	6.950.000	12 Bulan	7.645.000	12 Bulan	8.409.500	12 Bulan	9.250.450	4 Bul8 an	32.254.950	Inspektorat Daerah
	6	0	0	2	0	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	181.288.000	12 Bulan	199.416.800	12 Bulan	219.358.480	12 Bulan	241.294.328	4 Bul8 an	841.357.608	Inspektorat Daerah

						6	0 1	0 1		2 .	0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	3	Paket	115.000.000	3	Paket	126.500.000	3	Paket	139.150.000	3	Paket	153.065.000	1 2 Pa ket	533.715.000	Inspektorat Daerah
						6	0 1	0 1		2 .	0 7	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pegadaan mebeleur	1	Paket	35.000.000	1	Paket	38.500.000	1	Paket	42.350.000	1	Paket	46.585.000	4 Pa ket	162.435.000	Inspektorat Daerah
						6	0 1	0 1		2 .	0 7	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1	Paket	40.000.000	1	Paket	44.000.000	1	Paket	48.400.000	1	Paket	53.240.000	4 Pa ket	185.640.000	Inspektorat Daerah
						6	0 1	0 1		2 .	0 7	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor	1	Paket	40.000.000	1	Paket	44.000.000	1	Paket	48.400.000	1	Paket	53.240.000	4 Pa ket	185.640.000	Inspektorat Daerah
						6	0 1	0 1		2 .	0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Sub Organisasi	194.379.000	3	Sub Organisasi	213.816.900	3	Sub Organisasi	235.198.590	3	Sub Organisasi	258.718.449	1 2 Su b Or ga ni sasi	902.112.939	Inspektorat Daerah
						6	0 1	0 1		2 .	0 8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	13 00	Surat	19.800.000	13 00	Surat	21.780.000	130 0	Surat	23.958.000	1 3 0 0	Surat	26.353.800	5 Su b rat	91.891.800	

			6	0 1	0 1	2 0	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Rekening Air dan Rekening Listrik	4	Rekening	26.995.000	4	Rekening	29.694.500	4	Rekening	32.663.950	4	Rekening	35.930.345	1 6	Re ke nin g	125.283.795	Insp ekto rat Daer ah
			6	0 1	0 1	2 0	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sub Organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantornya	3	Sub Orga nisasi	147.584.000	3	Sub Orga nisasi	162.342.400	3	Sub Organi sasi	178.576.640	3	Sub Organisa si	196.434.304	1 2	Su b Or ga niasi	684.937.344	Insp ekto rat Daer ah
			6	0 1	0 1	2 0	9	Kegiatan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	3	Sub Orga nisasi	293.433.000	3	Sub Orga nisasi	322.776.300	3	Sub Organi sasi	355.053.930	3	Sub Organisa si	390.559.323	1 2	Su b Or ga niasi	1.361.822.553	Insp ekto rat Daer ah
			6	0 1	0 1	2 0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Motor dan Minibus yang dibayar pajaknya	9	unit	99.308.000	9	unit	109.238.800	9	unit	120.162.680	9	unit	132.178.948	3 uni t	460.888.428	Insp ekto rat Daer ah	
			6	0 1	0 1	2 0	0 6	Sub Kegiatan Pemelihara an	Jumlah peralatan gedung kantor	1	Pake t	7.125.000	1	Pake t	7.837.500	1	Paket	8.621.250	1	Paket	9.483.375	4 Pa ket	33.067.125	Insp ekto rat Daer ah	

					Peralatan dan Mesin Lainnya	dan mesin yang dipelihara									ah			
		6	0	0	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	187.000.000	1 Gedung	205.700.000	1 Gedung	226.270.000	1 Gedung	248.897.000	4 Gedung	867.867.000	Inspektorat Daerah
		6	0	1	2													
		6	0	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	321 Laporan	2.835.791.000	324 Laporan	3.119.370.100	324 Laporan	3.431.307.110	324 Laporan	3.774.437.821	1 La2 po9 ra3 n	13.160.906.031	Inspektorat Daerah
		6	0	1	2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Internal	287 Laporan	2.271.675.000	290 Laporan	2.498.842.500	290 Laporan	2.748.726.750	290 Laporan	3.023.599.425	1 La1 po5 ra7 n	10.542.843.675	Inspektorat Daerah
		6	0	1	2	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengawasan kinerja secara berkala	1 LHP	74.550.000	4 LHP	82.005.000	4 LHP	90.205.500	4 LHP	99.226.050	1 LH3 P	345.986.550	Inspektorat Daerah

			6	0 1	0 2	2 .	0 1	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengawasan keuangan secara berkala	11 7	LHP	1.135.000.000	11 7	LHP	1.248.500.000	117	LHP	1.373.350.000	1 1 7	LHP	1.510.685.000	4 6 8	LH P	5.267.535.000	Inspektorat Daerah
			6	0 1	0 2	2 .	0 1	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	LHR	75.130.000	5	LHR	82.643.000	5	LHR	90.907.300	5	LHR	99.998.030	2 0	LH R	348.678.330	Inspektorat Daerah
			6	0 1	0 2	2 .	0 1	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18	LHR	270.765.000	18	LHR	297.841.500	18	LHR	327.625.650	1 8	LHR	360.388.215	7 2	LH R	1.256.620.365	Inspektorat Daerah
			6	0 1	0 2	2 .	0 1	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil pengawasan desa	14 1	Laporan	490.000.000	14 1	LHP	539.000.000	141	LHP	592.900.000	1 4 1	LHP	652.190.000	5 6 4	LH P	2.274.090.000	Inspektorat Daerah
			6	0 1	0 2	2 .	0 1	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1	Kesepakatan	77.950.000	1	Kesepakatan	85.745.000	1	Kesepakatan	94.319.500	1	Kesepakatan	103.751.450	4	Kesepakatan	361.765.950	Inspektorat Daerah

6	0	0	2	2	0	7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	Laporan	148.280.000	4	Laporan	163.108.000	4	Laporan	179.418.800	4	Laporan	197.360.680	1 6 La po ra n	688.167.480	Inspektorat Daerah
6	0	0	2	2	0	2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	34	Laporan	564.116.000	34	Laporan	620.527.600	34	Laporan	682.580.360	3 4 La po ra n	750.838.396	1 3 3 La po ra n	2.618.062.356	Inspektorat Daerah	
6	0	0	2	2	0	1	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4	Laporan	48.846.000	4	Laporan	53.730.600	4	Laporan	59.103.660	4 La po ra n	65.014.026	1 6 La po ra n	226.694.286	Inspektorat Daerah	
6	0	0	2	2	0	2	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	30	Laporan	515.270.000	30	Laporan	566.797.000	30	Laporan	623.476.700	3 0 La po ra n	685.824.370	1 2 2 La po ra n	2.391.368.070	Inspektorat Daerah	

6	0	0	0	3	PROGRAM PERUMUSA N KEBIJAKAN, PENDAMPI NGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	48	Lapo ran	377.590.000	48	Lapo ran	415.349.000	48	Lapora n	456.883.900	4 8	Laporan	502.572.290	1 9 2 La po ra n	1.752.395.190	Insp ekto rat Dae rah
6	0	0	0	2	Kegiatan Pendampin gan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendamp ingan dan asistensi	48	Lapo ran	377.590.000	48	Lapo ran	415.349.000	48	Lapora n	456.883.900	4 8	Laporan	502.572.290	1 9 2 La po ra n	1.752.395.190	
6	0	0	0	2	Sub Kegiatan Pendampin gan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendamp ingan, Asistensi, Verifikasi , dan Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerint ah Daerah	33	LHE	158.230.000	33	LHE	174.053.000	33	LHE	191.458.300	3 3	LHE	210.604.130	1 3 2 LH E 2	734.345.430	Insp ekto rat Daer ah

6	0	0	2	0	3	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	Laporan	134.060.000	10	Laporan	147.466.000	10	Laporan	162.212.600	10	Laporan	178.433.860	40 Laporan	622.172.460	Inspektorat Daerah
6	0	0	2	0	4	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5	Laporan	85.300.000	5	Laporan	93.830.000	5	Laporan	103.213.000	5	Laporan	113.534.300	20 Laporan	395.877.300	Inspektorat Daerah
<b>TOTAL</b>										<b>10.356.380.500</b>			<b>11.392.018.550</b>			<b>12.531.220.405</b>			<b>13.784.342.446</b>		<b>48.063.961.901</b>	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat tentunya mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7**  
**Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 dengan catatan	Level 3 dengan catatan		Level 3 dengan catatan
2.	Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 2 dengan catatan	Level 2 dengan catatan	Level 3	Level 3		Level 3

## **BAB VIII**

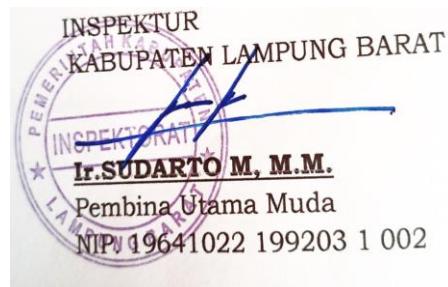
### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis yang merupakan penajaman program Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Inspektorat Kabupaten Lampung Barat untuk Tahun 2023-2026.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan dan lima tahunan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



## LAMPIRAN III

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

## Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	Target	Rp
		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Penyelenggaraan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan	6 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Bidang Urusan Yang Dilaksanakan	1 Bidang Urusan	6.835.684.200	1 Bidang Urusan	7.519.252.620	1 Bidang Urusan	8.271.177.882	1 Bidang Urusan	9.098.295.670	1 Bidang Urusan	31.724.410.372		
		6 01 01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	13 Dokumen	51.188.000	13 Dokumen	56.306.800	13 Dokumen	61.937.480	13 Dokumen	68.131.228	52 Dokumen	237.563.508		
		6 01 01	2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.218.000	2 Dokumen	14.539.800	2 Dokumen	15.993.780	2 Dokumen	17.593.158	8 Dokumen	61.344.738		
		6 01 01	2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.385.000	1 Dokumen	4.823.500	1 Dokumen	5.305.850	1 Dokumen	5.836.435	4 Dokumen	20.350.785		
		6 01 01	2.01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.120.000	1 Dokumen	4.532.000	1 Dokumen	4.985.200	1 Dokumen	5.483.720	4 Dokumen	19.120.920		
		6 01 01	2.01 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.530.000	1 Dokumen	4.983.000	1 Dokumen	5.481.300	1 Dokumen	6.029.430	4 Dokumen	21.023.730		
		6 01 01	2.01 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.720.000	1 Dokumen	4.092.000	1 Dokumen	4.501.200	1 Dokumen	4.951.320	4 Dokumen	17.264.520		
		6 01 01	2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	4.870.000	2 Dokumen	5.357.000	2 Dokumen	5.892.700	2 Dokumen	6.481.970	8 Dokumen	22.601.670		
		6 01 01	2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi perangkat daerah	5 Dokumen	16.345.000	5 Dokumen	17.979.500	5 Dokumen	19.777.450	5 Dokumen	21.755.195	20 Dokumen	75.857.145		
		6 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	19 Dokumen	5.935.194.500	19 Dokumen	6.528.713.950	19 Dokumen	7.181.585.345	19 Dokumen	7.899.743.880	76 Dokumen	27.545.237.675		
		6 01 01	2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan	14 Dokumen	5.926.054.500	14 Dokumen	6.518.659.950	14 Dokumen	7.170.525.945	14 Dokumen	7.887.578.540	56 Dokumen	27.502.818.935		
		6 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	3.130.000	1 Dokumen	3.443.000	1 Dokumen	3.787.300	1 Dokumen	4.166.030	Dokumen	14.526.330		
		6 01 01	2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2 Dokumen	2.900.000	2 Dokumen	3.190.000	2 Dokumen	3.509.000	2 Dokumen	3.859.900	8 Dokumen	13.458.900		
		6 01 01	2.02 08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.110.000	2 Dokumen	3.421.000	2 Dokumen	3.763.100	2 Dokumen	4.139.410	8 Dokumen	14.433.510		
		6 01 01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	30 Orang	326.680.000	30 Orang	359.348.000	30 Orang	395.282.800	30 Orang	434.811.080	120 Orang	1.516.121.880		
		6 01 01	2.05 05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan penilaian kinerja pegawai	2 Kali	26.680.000	2 Kali	29.348.000	2 Kali	32.282.800	2 Kali	35.511.080	8 Kali	123.821.880		
		6 01 01	2.05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat	18 Orang	300.000.000	19 Orang	330.000.000	20 Orang	363.000.000	21 Orang	399.300.000	78 Orang	1.392.300.000		
		6 01 01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya	3 Sub Organisasi	200.356.800	3 Sub Organisasi	220.392.480	3 Sub Organisasi	242.431.728	3 Sub Organisasi	266.674.901	12 Sub Organisasi	929.855.909		
		6 01 01	2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	10 Jenis	2.456.800	10 Jenis	2.702.480	10 Jenis	2.972.728	10 Jenis	3.270.001	40 Jenis	11.402.009		
		6 01 01	2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	14 Jenis	22.820.000	14 Jenis	25.102.000	14 Jenis	27.612.200	14 Jenis	30.373.420	56 Jenis	105.907.620		

		6	01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SKHU	4	SKHU	3.960.000	4	SKHU	4.356.000	4	SKHU	4.791.600	4	SKHU	5.270.760	16	SKHU	18.378.360
		6	01	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	6.312.000	12	Bulan	6.943.200	12	Bulan	7.637.520	12	Bulan	8.401.272	48	Bulan	29.293.992
		6	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	Bulan	164.808.000	12	Bulan	181.288.800	12	Bulan	199.417.680	12	Bulan	219.359.448	48	Bulan	764.873.928
		6	01	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1	Paket	35.000.000	3	Paket	38.500.000	3	Paket	42.350.000	3	Paket	46.585.000	10	Paket	162.435.000	
		6	01	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pegadaan mebel	1	Paket	35.000.000	1	Paket	38.500.000	1	Paket	42.350.000	1	Paket	46.585.000	4	Paket	162.435.000
		6	01	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	0	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	-	3	Paket	-
		6	01	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	-	3	Paket	-
		6	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Sub Organisasi	160.506.900	3	Sub Organisasi	176.557.590	3	Sub Organisasi	194.213.349	3	Sub Organisasi	213.634.684	12	Sub Organisasi	744.912.523	
		6	01	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1300	Surat	1.800.000	1300	Surat	1.980.000	1300	Surat	2.178.000	1300	Surat	2.395.800	5200	Surat	8.353.800
		6	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Rekening Air dan Rekening Listrik	4	Rekening	24.540.000	4	Rekening	26.994.000	4	Rekening	29.693.400	4	Rekening	32.662.740	16	Rekening	113.890.140
		6	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sub Organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantornya	3	Sub Organisasi	134.166.900	3	Sub Organisasi	147.583.590	3	Sub Organisasi	162.341.949	3	Sub Organisasi	178.576.144	12	Sub Organisasi	622.668.583
		6	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	3	Sub Organisasi	126.758.000	3	Sub Organisasi	139.433.800	3	Sub Organisasi	153.377.180	3	Sub Organisasi	168.714.898	12	Sub Organisasi	588.283.878	
		6	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Motor dan Minibus yang dibayar pajaknya	9	unit	90.280.000	9	unit	99.308.000	9	unit	109.238.800	9	unit	120.162.680	36	unit	418.989.480
		6	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor dan mesin yang dipelihara	1	Paket	6.478.000	1	Paket	7.125.800	1	Paket	7.838.380	1	Paket	8.622.218	4	Paket	30.064.398
		6	01	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1	Gedung	30.000.000	1	Gedung	33.000.000	1	Gedung	36.300.000	1	Gedung	39.930.000	4	Gedung	139.230.000
		6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	321	Laporan	2.835.791.000	324	Laporan	3.119.370.100	324	Laporan	3.431.307.110	324	Laporan	3.774.437.821	1293	Laporan	13.160.906.031	
		6	01	02	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Internal	287	Laporan	2.271.675.000	290	Laporan	2.498.842.500	290	Laporan	2.748.726.750	290	Laporan	3.023.599.425	1157	Laporan	10.542.843.675	
		6	01	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengawasan kinerja secara berkala	1	LHP	74.550.000	4	LHP	82.005.000	4	LHP	90.205.500	4	LHP	99.226.050	13	LHP	345.986.550
		6	01	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengawasan keuangan secara berkala	117	LHP	1.135.000.000	117	LHP	1.248.500.000	117	LHP	1.373.350.000	117	LHP	1.510.685.000	468	LHP	5.267.535.000
		6	01	02	2.01	03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	LHR	75.130.000	5	LHR	82.643.000	5	LHR	90.907.300	5	LHR	99.998.030	20	LHR	348.678.330
		6	01	02	2.01	04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18	LHR	270.765.000	18	LHR	297.841.500	18	LHR	327.625.650	18	LHR	360.388.215	72	LHR	1.256.620.365
		6	01	02	2.01	05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil pengawasan desa	141	Laporan	490.000.000	141	LHP	539.000.000	141	LHP	592.900.000	141	LHP	652.190.000	564	LHP	2.274.090.000
		6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1	Kesepakatan	77.950.000	1	Kesepakatan	85.745.000	1	Kesepakatan	94.319.500	1	Kesepakatan	103.751.450	4	Kesepakatan	361.765.950

		6	01	02	2.01	07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	Laporan	148.280.000	4	Laporan	163.108.000	4	Laporan	179.418.800	4	Laporan	197.360.680	16	Laporan	688.167.480
		6	01	02	2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	34	Laporan	564.116.000	34	Laporan	620.527.600	34	Laporan	682.580.360	34	Laporan	750.838.396	136	Laporan	2.618.062.356	
		6	01	02	2.02	01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4	Laporan	48.846.000	4	Laporan	53.730.600	4	Laporan	59.103.660	4	Laporan	65.014.026	16	Laporan	226.694.286
		6	01	02	2.02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	30	Laporan	515.270.000	30	Laporan	566.797.000	30	Laporan	623.476.700	30	Laporan	685.824.370	120	Laporan	2.391.368.070
		6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	48	Laporan	377.590.000	48	Laporan	415.349.000	48	Laporan	456.883.900	48	Laporan	502.572.290	192	Laporan	1.752.395.190	
		6	01	03	2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan dan asistensi	48	Laporan	377.590.000	48	Laporan	415.349.000	48	Laporan	456.883.900	48	Laporan	502.572.290	192	Laporan	1.752.395.190	
		6	01	03	2.02	02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	33	LHE	158.230.000	33	LHE	174.053.000	33	LHE	191.458.300	33	LHE	210.604.130	132	LHE	734.345.430
		6	01	03	2.02	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	Laporan	134.060.000	10	Laporan	147.466.000	10	Laporan	162.212.600	10	Laporan	178.433.860	40	Laporan	622.172.460
		6	01	03	2.02	04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5	Laporan	85.300.000	5	Laporan	93.830.000	5	Laporan	103.213.000	5	Laporan	113.534.300	20	Laporan	395.877.300
							TOTAL			10.049.065.200			11.053.971.720			12.159.368.892			13.375.305.781			46.637.711.593	

46.637.711.593





Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
<b>Inspektorat Daerah</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

## LAMPIRAN III

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

## Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	Target	Rp
		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Penyelenggaraan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan	6 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Bidang Urusan Yang Dilaksanakan	1 Bidang Urusan	6.835.684.200	1 Bidang Urusan	7.519.252.620	1 Bidang Urusan	8.271.177.882	1 Bidang Urusan	9.098.295.670	1 Bidang Urusan	31.724.410.372		
		6 01 01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	13 Dokumen	51.188.000	13 Dokumen	56.306.800	13 Dokumen	61.937.480	13 Dokumen	68.131.228	52 Dokumen	237.563.508		
		6 01 01	2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.218.000	2 Dokumen	14.539.800	2 Dokumen	15.993.780	2 Dokumen	17.593.158	8 Dokumen	61.344.738		
		6 01 01	2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.385.000	1 Dokumen	4.823.500	1 Dokumen	5.305.850	1 Dokumen	5.836.435	4 Dokumen	20.350.785		
		6 01 01	2.01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.120.000	1 Dokumen	4.532.000	1 Dokumen	4.985.200	1 Dokumen	5.483.720	4 Dokumen	19.120.920		
		6 01 01	2.01 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.530.000	1 Dokumen	4.983.000	1 Dokumen	5.481.300	1 Dokumen	6.029.430	4 Dokumen	21.023.730		
		6 01 01	2.01 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.720.000	1 Dokumen	4.092.000	1 Dokumen	4.501.200	1 Dokumen	4.951.320	4 Dokumen	17.264.520		
		6 01 01	2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	4.870.000	2 Dokumen	5.357.000	2 Dokumen	5.892.700	2 Dokumen	6.481.970	8 Dokumen	22.601.670		
		6 01 01	2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi perangkat daerah	5 Dokumen	16.345.000	5 Dokumen	17.979.500	5 Dokumen	19.777.450	5 Dokumen	21.755.195	20 Dokumen	75.857.145		
		6 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	19 Dokumen	5.935.194.500	19 Dokumen	6.528.713.950	19 Dokumen	7.181.585.345	19 Dokumen	7.899.743.880	76 Dokumen	27.545.237.675		
		6 01 01	2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan	14 Dokumen	5.926.054.500	14 Dokumen	6.518.659.950	14 Dokumen	7.170.525.945	14 Dokumen	7.887.578.540	56 Dokumen	27.502.818.935		
		6 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	3.130.000	1 Dokumen	3.443.000	1 Dokumen	3.787.300	1 Dokumen	4.166.030	Dokumen	14.526.330		
		6 01 01	2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2 Dokumen	2.900.000	2 Dokumen	3.190.000	2 Dokumen	3.509.000	2 Dokumen	3.859.900	8 Dokumen	13.458.900		
		6 01 01	2.02 08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.110.000	2 Dokumen	3.421.000	2 Dokumen	3.763.100	2 Dokumen	4.139.410	8 Dokumen	14.433.510		
		6 01 01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	30 Orang	326.680.000	30 Orang	359.348.000	30 Orang	395.282.800	30 Orang	434.811.080	120 Orang	1.516.121.880		
		6 01 01	2.05 05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan penilaian kinerja pegawai	2 Kali	26.680.000	2 Kali	29.348.000	2 Kali	32.282.800	2 Kali	35.511.080	8 Kali	123.821.880		
		6 01 01	2.05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat	18 Orang	300.000.000	19 Orang	330.000.000	20 Orang	363.000.000	21 Orang	399.300.000	78 Orang	1.392.300.000		
		6 01 01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya	3 Sub Organisasi	200.356.800	3 Sub Organisasi	220.392.480	3 Sub Organisasi	242.431.728	3 Sub Organisasi	266.674.901	12 Sub Organisasi	929.855.909		
		6 01 01	2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	10 Jenis	2.456.800	10 Jenis	2.702.480	10 Jenis	2.972.728	10 Jenis	3.270.001	40 Jenis	11.402.009		
		6 01 01	2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	14 Jenis	22.820.000	14 Jenis	25.102.000	14 Jenis	27.612.200	14 Jenis	30.373.420	56 Jenis	105.907.620		

		6	01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SKHU	4	SKHU	3.960.000	4	SKHU	4.356.000	4	SKHU	4.791.600	4	SKHU	5.270.760	16	SKHU	18.378.360
		6	01	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	6.312.000	12	Bulan	6.943.200	12	Bulan	7.637.520	12	Bulan	8.401.272	48	Bulan	29.293.992
		6	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	Bulan	164.808.000	12	Bulan	181.288.800	12	Bulan	199.417.680	12	Bulan	219.359.448	48	Bulan	764.873.928
		6	01	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1	Paket	35.000.000	3	Paket	38.500.000	3	Paket	42.350.000	3	Paket	46.585.000	10	Paket	162.435.000	
		6	01	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pegadaan mebel	1	Paket	35.000.000	1	Paket	38.500.000	1	Paket	42.350.000	1	Paket	46.585.000	4	Paket	162.435.000
		6	01	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	0	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	-	3	Paket	-
		6	01	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	-	3	Paket	-
		6	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Sub Organisasi	160.506.900	3	Sub Organisasi	176.557.590	3	Sub Organisasi	194.213.349	3	Sub Organisasi	213.634.684	12	Sub Organisasi	744.912.523	
		6	01	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1300	Surat	1.800.000	1300	Surat	1.980.000	1300	Surat	2.178.000	1300	Surat	2.395.800	5200	Surat	8.353.800
		6	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Rekening Air dan Rekening Listrik	4	Rekening	24.540.000	4	Rekening	26.994.000	4	Rekening	29.693.400	4	Rekening	32.662.740	16	Rekening	113.890.140
		6	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sub Organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantornya	3	Sub Organisasi	134.166.900	3	Sub Organisasi	147.583.590	3	Sub Organisasi	162.341.949	3	Sub Organisasi	178.576.144	12	Sub Organisasi	622.668.583
		6	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	3	Sub Organisasi	126.758.000	3	Sub Organisasi	139.433.800	3	Sub Organisasi	153.377.180	3	Sub Organisasi	168.714.898	12	Sub Organisasi	588.283.878	
		6	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Motor dan Minibus yang dibayar pajaknya	9	unit	90.280.000	9	unit	99.308.000	9	unit	109.238.800	9	unit	120.162.680	36	unit	418.989.480
		6	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor dan mesin yang dipelihara	1	Paket	6.478.000	1	Paket	7.125.800	1	Paket	7.838.380	1	Paket	8.622.218	4	Paket	30.064.398
		6	01	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1	Gedung	30.000.000	1	Gedung	33.000.000	1	Gedung	36.300.000	1	Gedung	39.930.000	4	Gedung	139.230.000
		6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	321	Laporan	2.835.791.000	324	Laporan	3.119.370.100	324	Laporan	3.431.307.110	324	Laporan	3.774.437.821	1293	Laporan	13.160.906.031	
		6	01	02	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Internal	287	Laporan	2.271.675.000	290	Laporan	2.498.842.500	290	Laporan	2.748.726.750	290	Laporan	3.023.599.425	1157	Laporan	10.542.843.675	
		6	01	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengawasan kinerja secara berkala	1	LHP	74.550.000	4	LHP	82.005.000	4	LHP	90.205.500	4	LHP	99.226.050	13	LHP	345.986.550
		6	01	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengawasan keuangan secara berkala	117	LHP	1.135.000.000	117	LHP	1.248.500.000	117	LHP	1.373.350.000	117	LHP	1.510.685.000	468	LHP	5.267.535.000
		6	01	02	2.01	03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	LHR	75.130.000	5	LHR	82.643.000	5	LHR	90.907.300	5	LHR	99.998.030	20	LHR	348.678.330
		6	01	02	2.01	04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18	LHR	270.765.000	18	LHR	297.841.500	18	LHR	327.625.650	18	LHR	360.388.215	72	LHR	1.256.620.365
		6	01	02	2.01	05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil pengawasan desa	141	Laporan	490.000.000	141	LHP	539.000.000	141	LHP	592.900.000	141	LHP	652.190.000	564	LHP	2.274.090.000
		6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1	Kesepakatan	77.950.000	1	Kesepakatan	85.745.000	1	Kesepakatan	94.319.500	1	Kesepakatan	103.751.450	4	Kesepakatan	361.765.950

		6	01	02	2.01	07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	Laporan	148.280.000	4	Laporan	163.108.000	4	Laporan	179.418.800	4	Laporan	197.360.680	16	Laporan	688.167.480
		6	01	02	2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	34	Laporan	564.116.000	34	Laporan	620.527.600	34	Laporan	682.580.360	34	Laporan	750.838.396	136	Laporan	2.618.062.356	
		6	01	02	2.02	01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4	Laporan	48.846.000	4	Laporan	53.730.600	4	Laporan	59.103.660	4	Laporan	65.014.026	16	Laporan	226.694.286
		6	01	02	2.02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	30	Laporan	515.270.000	30	Laporan	566.797.000	30	Laporan	623.476.700	30	Laporan	685.824.370	120	Laporan	2.391.368.070
		6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	48	Laporan	377.590.000	48	Laporan	415.349.000	48	Laporan	456.883.900	48	Laporan	502.572.290	192	Laporan	1.752.395.190	
		6	01	03	2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan dan asistensi	48	Laporan	377.590.000	48	Laporan	415.349.000	48	Laporan	456.883.900	48	Laporan	502.572.290	192	Laporan	1.752.395.190	
		6	01	03	2.02	02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	33	LHE	158.230.000	33	LHE	174.053.000	33	LHE	191.458.300	33	LHE	210.604.130	132	LHE	734.345.430
		6	01	03	2.02	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	Laporan	134.060.000	10	Laporan	147.466.000	10	Laporan	162.212.600	10	Laporan	178.433.860	40	Laporan	622.172.460
		6	01	03	2.02	04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5	Laporan	85.300.000	5	Laporan	93.830.000	5	Laporan	103.213.000	5	Laporan	113.534.300	20	Laporan	395.877.300
						TOTAL					10.049.065.200			11.053.971.720			12.159.368.892			13.375.305.781			46.637.711.593

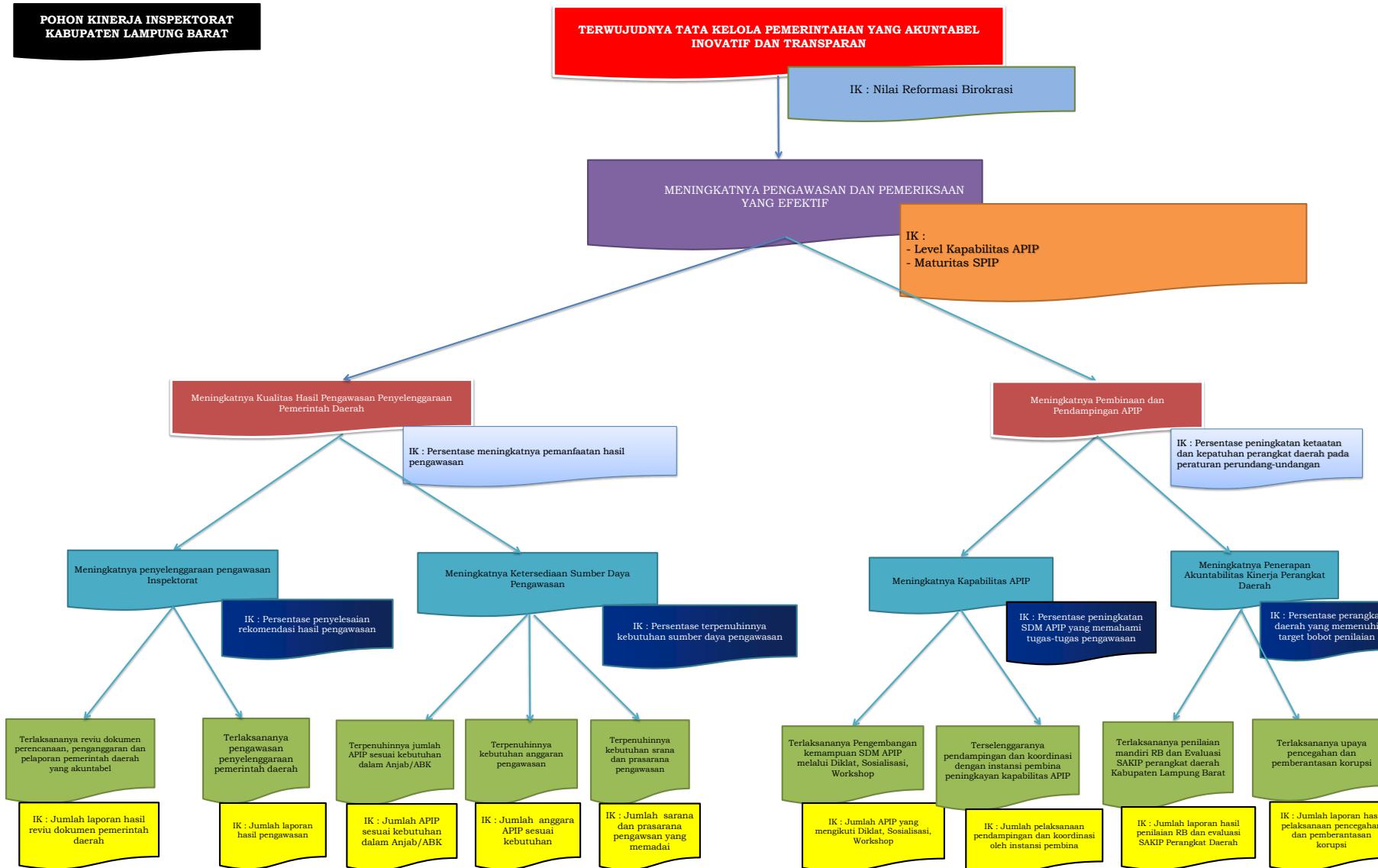
46.637.711.593





Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
<b>Inspektorat Daerah</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

**POHON KINERJA INSPEKTORAT  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



## LAMPIRAN IV

Tabel Detail Subkegiatan Tahun 2023-2026

Inspektorat Daerah

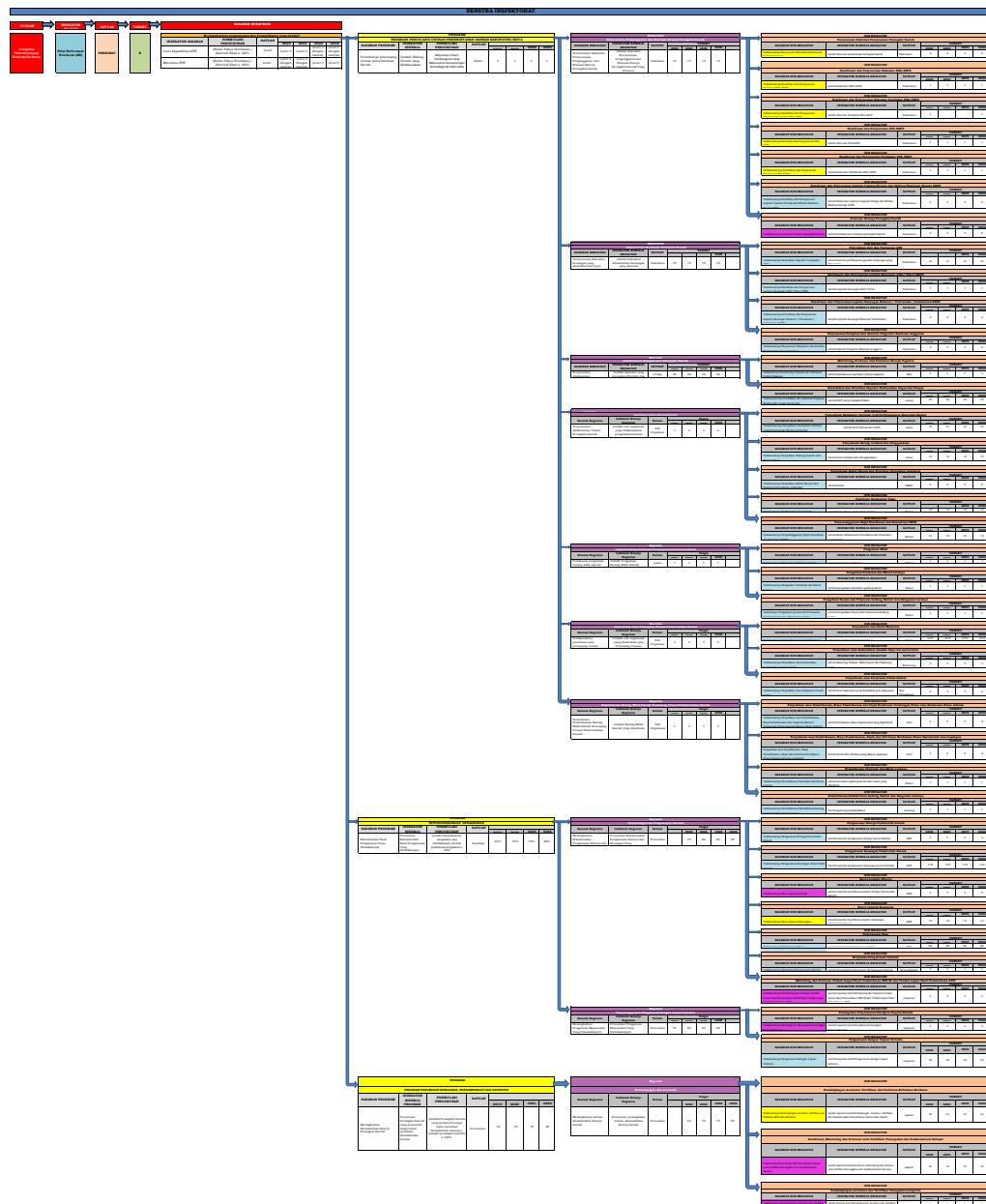
Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	2023	2024	2025	2026
6	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
6	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
6	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja dan Renstra (2 Dokumen )			
6	01	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA SKPD (1 Dokumen)			
6	01	01	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan RKA Perubahan SKPD (1 Dokumen)			
6	01	01	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA SKPD (1 Dokumen)			
6	01	01	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Penyusunan DPA Perubahan SKPD (1 Dokumen)			
6	01	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen LPPD, KPJ, LAKIP, Perjanjian Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi 5 Dokumen	Penyusunan Dokumen LPPD, KPJ, LAKIP, Perjanjian Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi 5 Dokumen	Penyusunan Dokumen LPPD, KPJ, LAKIP, Perjanjian Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi 5 Dokumen	Penyusunan Dokumen LPPD, KPJ, LAKIP, Perjanjian Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi 5 Dokumen
6	01	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rapat internal Inspektorat 12 Bulan			
6	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
6	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Inspektorat			
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Dokumen laporan akhir tahun 1 Dokumen			
6	01	01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Penyusunan Dokumen Laporan semesteran 2 Dokumen			

6	01	01	2.02	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Laporan dan Analisis prognosis Anggaran 2 Dokumen	Penyusunan Dokumen Laporan dan Analisis prognosis Anggaran 2 Dokumen	Penyusunan Dokumen Laporan dan Analisis prognosis Anggaran 2 Dokumen	Penyusunan Dokumen Laporan dan Analisis prognosis Anggaran 2 Dokumen
6	01	01	2.05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
6	01	01	2.05	05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 kali penilaian untuk periode kenaikan pangkat (April dan Oktober)	2 kali penilaian untuk periode kenaikan pangkat (April dan Oktober)	2 kali penilaian untuk periode kenaikan pangkat (April dan Oktober)	2 kali penilaian untuk periode kenaikan pangkat (April dan Oktober)
6	01	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biaya diklat untuk 18 orang			
6	01	01	2.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
6	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja alat listrik untuk pemeliharaan listrik kantor	Belanja alat listrik untuk pemeliharaan listrik kantor	Belanja alat listrik untuk pemeliharaan listrik kantor	Belanja alat listrik untuk pemeliharaan listrik kantor
6	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja blanko cetak (Blangko surat Kop Bupati, Kop Sekda, Kop Inspektorat, Amplop cetak, blangko SPPD) dan photocopy rutin kantor	Belanja blanko cetak (Blangko surat Kop Bupati, Kop Sekda, Kop Inspektorat, Amplop cetak, blangko SPPD) dan photocopy rutin kantor	Belanja blanko cetak (Blangko surat Kop Bupati, Kop Sekda, Kop Inspektorat, Amplop cetak, blangko SPPD) dan photocopy rutin kantor	Belanja blanko cetak (Blangko surat Kop Bupati, Kop Sekda, Kop Inspektorat, Amplop cetak, blangko SPPD) dan photocopy rutin kantor
6	01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tagihan Surat Kabar Harian Umum (Koran) sebanyak 4 eksemplar per hari	tagihan Surat Kabar Harian Umum (Koran) sebanyak 4 eksemplar per hari	tagihan Surat Kabar Harian Umum (Koran) sebanyak 4 eksemplar per hari	tagihan Surat Kabar Harian Umum (Koran) sebanyak 4 eksemplar per hari
6	01	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja makan minum tamu kantor untuk 12 bulan	Belanja makan minum tamu kantor untuk 12 bulan	Belanja makan minum tamu kantor untuk 12 bulan	Belanja makan minum tamu kantor untuk 12 bulan
6	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas rutin kantor untuk 12 bulan			
6	01	01	2.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
6	01	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan Meja Kursi, Lemari dan Kursi ruang tamu	Pengadaan Meja Kursi, Lemari dan Kursi ruang tamu	Pengadaan Meja Kursi, Lemari dan Kursi ruang tamu	Pengadaan Meja Kursi, Lemari dan Kursi ruang tamu
6	01	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-
6	01	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-

6	01	01	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
6	01	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian materai dan biaya pengiriman surat/paket				
6	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bayar tagihan 12 bulan : rekening listrik 1, rekening telepon 2, internet 1.	Bayar tagihan 12 bulan : rekening listrik 1, rekening telepon 2, internet 1.	Bayar tagihan 12 bulan : rekening listrik 1, rekening telepon 2, internet 1.	Bayar tagihan 12 bulan : rekening listrik 1, rekening telepon 2, internet 1.	
6	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja rutin ATK kantor, peralatan kebersihan kantor, honor pengelola keuangan, honor tenaga kebersihan	Belanja rutin ATK kantor, peralatan kebersihan kantor, honor pengelola keuangan, honor tenaga kebersihan	Belanja rutin ATK kantor, peralatan kebersihan kantor, honor pengelola keuangan, honor tenaga kebersihan	Belanja rutin ATK kantor, peralatan kebersihan kantor, honor pengelola keuangan, honor tenaga kebersihan	
6	01	01	2.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
6	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas 7 unit	Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas 7 unit	Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas 7 unit	Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas 7 unit	
6	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan kantor : genset, komputer, printer				
6	01	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	
6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>					
6	01	02	2.01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>					
6	01	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Kinerja	Audit Kinerja	Audit Kinerja	Audit Kinerja	
6	01	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan 75 LHP Sekolah,15 LHP Puskesmas dan 27 LHP OPD	Pengawasan Keuangan 75 LHP Sekolah,15 LHP Puskesmas dan 27 LHP OPD	Pengawasan Keuangan 75 LHP Sekolah,15 LHP Puskesmas dan 27 LHP OPD	Pengawasan Keuangan 75 LHP Sekolah,15 LHP Puskesmas dan 27 LHP OPD	
6	01	02	2.01	03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Reviu 1 LHR LKjIP Pemda				

6	01	02	<b>2.01</b>	04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	#####	#####	#####
6	01	02	<b>2.01</b>	05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	66 LHP ADD Pekon, Monev 15 Kec, 60 LHP AMJ Peratin	66 LHP ADD Pekon, Monev 15 Kec, 60 LHP AMJ Peratin	66 LHP ADD Pekon, Monev 15 Kec, 60 LHP AMJ Peratin
6	01	02	<b>2.01</b>	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	1 Kesepakatan Kerjasama Antara Inspektorat,Polres,dan Kejaksaan Negeri	1 Kesepakatan Kerjasama Antara Inspektorat,Polres,dan Kejaksaan Negeri	1 Kesepakatan Kerjasama Antara Inspektorat,Polres,dan Kejaksaan Negeri
6	01	02	<b>2.01</b>	07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 laporan evaluasi berkala TLHP, 1 laporan Inventarisasi TLHP, 1 kali TLHP BPK, 1 kali TLHP APIP Provinsi, 1 kali TLHP APIP Kabupaten	1 laporan evaluasi berkala TLHP, 1 laporan Inventarisasi TLHP, 1 kali TLHP BPK, 1 kali TLHP APIP Provinsi, 1 kali TLHP APIP Kabupaten	1 laporan evaluasi berkala TLHP, 1 laporan Inventarisasi TLHP, 1 kali TLHP BPK, 1 kali TLHP APIP Provinsi, 1 kali TLHP APIP Kabupaten
6	01	02	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>			
6	01	02	<b>2.02</b>	01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 4 laporan	Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 4 laporan	Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 4 laporan	Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 4 laporan
6	01	02	<b>2.02</b>	02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	21 LHP (20 LHP kasus pengaduan, 1 Laporan Probity Audit)	21 LHP (20 LHP kasus pengaduan, 1 Laporan Probity Audit)	21 LHP (20 LHP kasus pengaduan, 1 Laporan Probity Audit)
6	01	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			
6	01	03	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>			
6	01	03	<b>2.02</b>	02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Evaluasi SAKIP perangkat daerah, PMPRB, PMPZI, Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	Evaluasi SAKIP perangkat daerah, PMPRB, PMPZI, Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	Evaluasi SAKIP perangkat daerah, PMPRB, PMPZI, Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
6	01	03	<b>2.02</b>	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 laporan Koordinasi pengawasan komprehensif, 1 laporan Aksi PPK Pemda, 1 laporan sosialisasi LHKASN, 1 laporan pemantauan Stranas/strategis nasional pemberantasan korupsi, Pengendalian gratifikasi	1 laporan Koordinasi pengawasan komprehensif, 1 laporan Aksi PPK Pemda, 1 laporan sosialisasi LHKASN, 1 laporan pemantauan Stranas/strategis nasional pemberantasan korupsi, Pengendalian gratifikasi	1 laporan Koordinasi pengawasan komprehensif, 1 laporan Aksi PPK Pemda, 1 laporan sosialisasi LHKASN, 1 laporan pemantauan Stranas/strategis nasional pemberantasan korupsi, Pengendalian gratifikasi

6	01	03	<b>2.02</b>	04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 laporan Survey penilaian integritas			
---	----	----	-------------	----	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



**LAMPIRAN II**  
 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
 Kabupaten Lampung Barat

Nama PD : .....

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/ Renja Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah				
	<b>Pengawasan</b>					10.356.380.500								11.392.018.550	
	<b>Inspektorat</b>					10.356.380.500								11.392.018.550	
X XX 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Jumlah Bidang Urusan Yang Dilaksanakan	<b>1 Bidang Urusan</b>	1 bidang urusan	1 bidang urusan	<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>7.142.999.500</b>	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>7.857.299.450</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>
X XX 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	52 Dokumen	13 dokumen	65 dokumen	13 Dokumen	54.265.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	13 Dokumen	59.691.500	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	2 dokumen	10 dokumen	2 Dokumen	14.540.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	2 Dokumen	15.994.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 dokumen	5 dokumen	1 Dokumen	4.385.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	1 Dokumen	4.823.500	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 dokumen	5 dokumen	1 Dokumen	4.120.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	1 Dokumen	4.532.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.01 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 dokumen	5 dokumen	1 Dokumen	4.530.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	1 Dokumen	4.983.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.01 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	4 Dokumen	1 dokumen	5 dokumen	1 Dokumen	3.720.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	1 Dokumen	4.092.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	2 dokumen	10 dokumen	2 Dokumen	4.870.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	2 Dokumen	5.357.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi perangkat daerah	20 Dokumen	5 dokumen	25 dokumen	5 Dokumen	18.100.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	5 Dokumen	19.910.000	Inspektorat Daerah
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	76 Dokumen	19 dokumen	95 dokumen	19 Dokumen	5.936.124.500	Kab. Lampung Barat				Aparatur	19 Dokumen	6.529.736.950	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan	56 Dokumen	14 Dokumen	70 Dokumen	14 Dokumen	5.926.054.500	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	14 Dokumen	6.518.659.950	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.02 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	3.445.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	1 Dokumen	3.789.500	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.02 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	8 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	3.200.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	2 Dokumen	3.520.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.02 03	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	3.425.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	2 Dokumen	3.767.500	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.02 04	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah</b>	Jumlah Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	120 Orang	46 orang	230 orang	30 Orang	329.350.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	30 Orang	362.285.000	Inspektorat Daerah

X XX 01 2.02.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan penilaian kinerja pegawai	8 Kali	2 Kali	10 Kali	2 Kali	29.350.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	2 Kali	32.285.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.02.06	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat	78 Orang	26 orang	230 orang	18 Orang	300.000.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	19 Orang	330.000.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.02.07	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya	12 Sub Organisasi	3 sub organisasi	3 sub organisasi	3 Sub Organisasi	220.448.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	3 Sub Organisasi	242.492.800	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.02.08	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	40 Jenis	10 Jenis	50 Jenis	10 Jenis	2.750.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	10 Jenis	3.025.000	Inspektorat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	56 Jenis	14 Jenis	70 Jenis	14 Jenis	25.100.000	Kab. Lampung Barat					14 Jenis	27.610.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.03	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	16 SKHU	4 SKHU	30 SKHU	4 SKHU	4.360.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	4 SKHU	4.796.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minuman tamu	48 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	6.950.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	12 Bulan	7.645.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.03.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	48 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	181.288.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	12 Bulan	199.416.800	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.03.03	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Paket	3 Paket	15 Paket	3 Paket	115.000.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	3 Paket	126.500.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.03.04	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	4 Paket	1 Paket	5 Paket	1 Paket	35.000.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	1 Paket	38.500.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.03.05	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 Paket	1 Paket	5 Paket	1 Paket	40.000.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	1 Paket	44.000.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.03.06	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4 Paket	1 Paket	5 Paket	1 Paket	40.000.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	1 Paket	44.000.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.03.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Sub Organisasi	3 sub organisasi	3 sub organisasi	3 Sub Organisasi	194.379.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	3 Sub Organisasi	213.816.900	Inspektorat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	5200 Surat	1275 Surat	6375 Surat	1300 Surat	19.800.000	Kab. Lampung Barat					1300 Surat	21.780.000	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Rekening Air dan Rekening Listrik	16 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	26.995.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	4 Rekening	29.694.500	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sub Organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantornya	12 Sub Organisasi	3 sub organisasi	3 sub organisasi	3 Sub Organisasi	147.584.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	3 Sub Organisasi	162.342.400	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.04.02	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	12 Sub Organisasi	3 sub organisasi	3 sub organisasi	3 Sub Organisasi	293.433.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	3 Sub Organisasi	322.776.300	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.04.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Motor dan Minibus yang dibayar pajaknya	36 unit	9 Unit	9 Unit	9 unit	99.308.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	9 unit	109.238.800	Inspektorat Daerah
X XX 01 2.04.04	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor dan mesin yang dipelihara	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.125.000	Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	1 Paket	7.837.500	Inspektorat Daerah

